

**Pelaksanaan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan K    Pekanbaru dalam Meraih Penghargaan Adipura (Studi perbandingan pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dengan masa pemerintahan Walikota Firdaus)**

**SELLY ANGELINA dan CHALID SAHURI**

Email : [www.selly\\_angelina@yahoo.co.id](mailto:www.selly_angelina@yahoo.co.id) Telp 081378040985

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universit    au, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

**Abstract**

*Pekanbaru is the one of cleanest city in Indonesia in 2005-2011. Evidenced by the Adipura Cup. But, in 2012 the city of Pekanbaru cannot Adipura Cup. Due to the increase of the population of the city of pekanbaru. Chang assessment Adipura, is judgement in all the city area, public active role. And one day of judgement a    olitical situation in Pekanbaru that is not conducive. In this study researcher analyzed the strategy Department of Hygiene and Landscape Pekanbaru. By comparing the implementation of the strategy at the time of Mayor Herman Abdullah and the Mayor of Firdaus. And find out what factors lead to differences in the implementation of strategy of each mayor.*

**Keywords:** *Strategy, cleannes, awarded the adipura*

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 259.940.857 jiwa pada tahun 2010, jumlah penduduk ini terus bertambah setiap tahunnya menyebabkan berbagai masalah salah satunya persolan kebersihan. Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia membuat program Adipura, penghargaan Adipura ini diberikan bagi kota-kota di Indonesia yang mampu meningkatkan kebersihan kotanya.

Munculnya program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Indonesia yang secara umum meliputi tiga h    pokok, yaitu kualitas hidup yang cenderung menurun, termasuk lingkungan hidup perkotaan,    ah di perkotaan adalah masalah kebersihan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik, pencemaran udara dan air. Dibeberapa kota mengalami masalah banjir dan    esulitan air bersih. Kapasitas aparatur pemerintahan relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum nampak secara signifikan.

Program adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyar    at untuk mewujudkan kota ‘bersih dan teduh’ (*clean and green city*) dengan menerapkan prinsip good governance. Dan program Adipura ini bertujuan mewujudkan masyarakat sehat, lingkungan hidup bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Program Adipura ini terdapat pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No    7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura. Adapun dasar hukum Adipur    yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 37 tahun1995 tentang pedoma    pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian program Adipura.

Adapun tujuan dari penilaian adipura dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 37 tahun 1995, yaitu: terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil duna dan bergaya guna, yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum dan

pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota. Terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, teduh, indah dan nyaman, terciptanya pembangunan sistem dalam menen ukan alternatif penerapan teknologi tepat guna, terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan. Dan terciptanya koordinsi dan kerjasama instansi terkait.

Kota Pekanbaru adalah kota terbesar di provinsi Riau. ota Pekanbaru sebagai kota Perdagangan dan Jasa. Kota ini merupakan ibukota Provinsi Riau yang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, transportasi, pendidi an dan juga peluang bisnis dan investasi yang cukup menjanjikan. Kota Pekanbaru berada di sekitar daerah pertambangan, industri dan perkebunan besar, sehingga menjadi pusat ayanan jasa keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di sekitarnya, menjadi pusat penyedia barang konsumsi, dan berbagai jasa atau layanan bagi masyarak t yang hidup di sekitarnya, jika dilihat dalam banyaknya jumlah penduduk maka di Indonesia kota ini merupakan jenis kota besar. Sebagaimana jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2011 ialah 937,939 jiwa, namun dari waktu ke waktu kota Pekanbaru selalu mengalami penambahan penduduk di proyeksikan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1,013,064, tidak hanya dalam pertumbuhan penduduk secara alami yaitu kelahiran, tetapi juga penambahan jumlah penduduk di ebankan oleh faktor migrasi. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dan sebagai pusat p rintahan tentunya kota ini harus bersih dari permasalahan sampah, lingkungan yang sejuk, bersih, dan sehat, dan keindahan tata ruang.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melaksa akan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan, la pu penerangan jalan dan lampu hias. Yang mana tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru ialah melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, d penataan pertamanan.

Adapun strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah ialah: Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait propinsi dan kota dalam pengelolaan sampah di a Pekanbaru, Meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang handal dan profesional, Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam mengupayakan penambahan melalui pihak swasta atau donatur, Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung kegiatan operasional kebersihan Kota Pekanbaru, Memperdayakan masyarakat te ang budaya hidup bersih dan bebas sampah melalui penyuluhan atau sosialisasi denga mengikutsertakan unsur LPM, Dharma Wanita, PKK, Pramuka, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan, Mengoptimalkan penerimaan retribusi kebersihan dengan ggali potensi yang ada.

Sedangkan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan mas pemerintahan Walikota Firdaus adalah: Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam peningkatan teknologi dan kapasitas sarana pengelolaan sampah, Memanfaatkan komi pemerintah Kota Pekanbaru melalui pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana y ng dibutuhkan, Pemanfaatan SDM, kelembagaan dan teknologi yang mendukung tugas po ok dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, mengadopsi dan menyesuaikan standar pelayanan dari pemerintah pusat dan propinsi serta menyesuaikan dengan kondisi sumber daya dan kearifan lokal masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan fasilitas dinas secara keseluruhan, menekan dan mengurangi volume sampah di rumah tangga sehingga dih pkan dapat mengurangi volume sampah terangkut.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa fenomena kebersihan di Kota Pekanbaru dari tahun 2005 sampai pada tahun 2011, Kota Pekanbaru selalu meraih penghargaan sebagai kota terbersih di Indonesia. Dapat kita lihat tugu penghargaan Adipura yang terletak di jalan Jenderal Sudirman di depan kantor Walikota Pekanbaru. Bisa dilihat bahwa Kota Pekanbaru dari tahun 2005-2011 selalu mendapatkan penghargaan sebagai kota terbersih yaitu Piala Adipura.

Jika kita lihat kebersihan di Kota Pekanbaru pada periode pemerintahan Walikota Herman Abdullah kondisi kebersihannya baik, terbukti penghargaan sebagai kota terbersih di raih pada periode pemerintahan Walikota Herman Abdullah. Kota Pekanbaru pada periode pemerintahannya bersih dari sampah, pemandangan kota tertata rapi dengan adanya pohon-pohon peneduh di pinggir jalan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yaitu bekerjanya instansi yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mana tugasnya adalah menjaga kebersihan dan keindahan kota, memelihara taman kota serta tanaman yang ada di seluruh penjuru kota. Walikota pada masa itu sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sidak (inspeksi mendadak). Namun kelemahannya ialah minimnya partisipasi publik dalam menjaga kebersihan. Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah dinas yang berwenang menjalankan kebersihan kota telah menyusun strategi yang bisa dilaksanakan untuk menjaga kebersihan kota. Strategi menurut teori adalah tindakan bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kota Pekanbaru sebagai Kota terbersih di Indonesia yang mana sudah 7 kali berturut-turut mendapat piala Adipura, namun pada tahun 2012 Kota Pekanbaru harus melepaskan penghargaan sebagai Kota terbersih. Pada fenomena ini penulis mengangkat permasalahan bagaimana strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih penghargaan Adipura dan bagaimana pelaksanaan strategi pada masa pemerintahan kota Herman Abdullah dan pelaksanaan strategi pada masa pemerintahan Firdaus.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih piala Adipura dan apa faktor-faktor yang menjadikan perbedaan pelaksanaan strategi kebersihan di kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih penghargaan Adipura dan mengetahui faktor-faktor yang menjadikan perbedaan pelaksanaan strategi kebersihan di kota Pekanbaru.

Menurut O'Toole dalam John M. Bryson (2005: 25) Strategi berasal dari kata *stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dari *stratos* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin. Alfred Chandler dalam Fitri Lukiastruti dan Muliawan Harjani (2011: 3) strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sementara Kenneth Andrew (2011: 4) strategi sebagai upaya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang serta ancaman dalam lingkungan yang dihadapi. Menurut Kenichi Ohmae (2011: 4) strategi adalah keunggulan bersaing guna menambah kekuatan perusahaan menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing melalui cara yang paling efisien.

Dari definisi yang di kemukakan dapat disimpulkan bahwa strategi adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam sebuah organisasi, yang mana pengambilan keputusan strategi itu dilakukan oleh manajer atau pimpinan puncak dalam suatu organisasi.

Strategi yang dirumuskan harus menggunakan kecakapan dan sumber daya yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat terus-menerus dan meningkat mengingat lingkungan yang ada di sekitar organisasi selalu mengalami perubahan. Dalam Usmara (2006:18) inti dari strategi bersaing adalah perbedaan, maksudnya adalah sengaja memilih aktivitas yang berbeda dalam rangka menghasilkan nilai kombinasi yang unik.

Menurut John A Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr dalam Amin (2008:2) manajemen strategik adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formulasi dan implementasi, rencana, yang didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategis dalam Nawawi (2005:148) adalah usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Manajemen strategis menurut Fred R. David (2006: 5) didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.

Menurut David (2006:11) manajemen strategis adalah tentang mendapatkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Sebuah perusahaan atau organisasi mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif hanya untuk periode tertentu karena ditiru pesaing dan melemahnya keunggulan tersebut. Jadi, tidaklah cukup untuk memiliki keunggulan kompetitif, perusahaan atau organisasi harus berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) dengan: (1) secara terus-menerus beradaptasi dengan tren dan kejadian eksternal serta kemampuan, kompetensi, dan sumber daya internal; dan (2) secara efektif memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi yang mengakumulasi keuntungan dari faktor-faktor tersebut.

Menurut Fred R David (2005:336) implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang mengelola semua hal selama tindakan dijalankan, implementasi strategi berfokus pada efisiensi, implementasi strategi merupakan proses operasional, implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan, dan implementasi strategi membutuhkan koordinasi di antara banyak individu.

Menurut George C Edwards III dalam Subarsono (2005:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi  
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

## METODE

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, dan lembaga yang terkait pada permasalahan yang penulis angkat yaitu pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi Penelitian ini didasarkan ada pertimbangan bahwa adanya hak otonomi kota dalam penyelenggaraan kebersihan, adanya knis kebersihan kota yang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai pelaksanaan kebersihan di Kota Pekanbaru. Informan adalah seseorang yang dalam penelitian menjadi narasumber untuk memberikan data atau orang yang memberikan keterangan. Informan disini adalah orang yang benar-benar mengetahui segala macam informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam menentukan informan ditentukan dengan metode *snow ball sampling* atau bola salju. Yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mulanya berjumlah kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang tahu terhadap masalah ini untuk menambahkan informasi yang masih kurang. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Kebersihan Kota, Pengamat Perkotaan dan Masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai informasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih penghargaan Adipura. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, dalam prakteknya diperoleh dari wawancara dan jawaban informan pada pertanyaan yang diberikan kemudian pengamatan langsung situasi lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, serta skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa gambaran umum kebersihan Kota Pekanbaru, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas.

Setelah data diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis dan macam data. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis komparatif atau perbandingan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang ada, dengan melihat

dan membandingkan suatu fenomena dan kenyataan pada masa lalu dan masa sekarang. Analisis ini didasarkan pada perbandingan suatu fenomena yang ada pada masa lalu dan masa sekarang, namun secara bersamaan dapat mengetahui kekurangan yang ada sehingga bisa menemukan rumusan yang baik untuk mengatasi kekurangan.

## HASIL

Dalam Fitri Lukiastruti dan Muliawan (2011:7 ) Penerapan strategi yang dipandang berhasil, pada umumnya ditentukan oleh kepiawaian para perumusny. Selain itu, ia juga merupakan kombinasi atau perpaduan serasi antara empat karakteristik utama. Perpaduan serasi antara empat karakteristik utama ialah sebagai berikut:

Tujuan yang mudah dipahami oleh setiap pribadi yang terlibat dalam perusahaan. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa setiap anggota organisasi dengan mengetahui apakah yang hendak dicapai oleh lembaga tempat mereka berada itu serta bagaimana mereka melakukan berbagai tindakan yang menunjang tujuan tersebut atau setidaknya bersedia untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan.

Penilaian dan analisis secara cermat atas lingkungan internal dan eksternal. Seringkali kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan secara rinci serta peluang dan ancaman yang ada merupakan setengah dari keberhasilan, sehingga perusahaan tinggal mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sembari berusaha keras menghindari tindakan yang mengandung resiko.

Penilaian dan alokasi sumber daya yang tepat. Apa saja sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dialokasikan untuk kegiatan yang mana harus dipikirkan secara cermat agar tidak terjadi kemubaziran di satu sisi serta kekurangan sumber daya di sisi lain.

Kemampuan melakukan improvisasi sesuai dengan perkembangan keadaan. Setiap langkah yang dirumuskan belum tentu akan bertemu dengan keadaan yang diinginkan, manakala keadaan telah berubah perumus kebijaksanaan harus mampu melakukan modifikasi atau bahkan perombakan atas strategi yang dirancang itu.

Untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih penghargaan Adipura dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 1. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru (Studi Perbandingan pada Masa Pemerintahan Walikota Herman Abdullah dengan Masa Pemerintahan Walikota Firdaus)

Adapun strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dan Walikota Firdaus adalah: Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah ialah: Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait propinsi dan kota dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang handal dan profesional, Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam mengupayakan penambahan melalui pihak swasta atau donatur, Penyediaan sarana dan

prasarana kebersihan yang mendukung kegiatan operasi l kebersihan Kota Pekanbaru, Memperdayakan masyarakat tentang budaya hidup bersih dan bebas sampah melalui penyuluhan atau sosialisasi dengan mengikutsertakan unsur LPM, Dharma Wanita, PKK, Pramuka, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan, Mengoptimalkan penerimaan retribusi kebersihan dengan menggali potensi yang ada.

Sedangkan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan mas pemerintahan Walikota adalah: Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam peningkatan teknologi dan kapasitas sarana pengelolaan sampah, Memanfaatkan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru melalui pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana yang butuhkan, Pemanfaatan SDM, kelembagaan dan teknologi yang mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, mengadopsi dan menyesuaikan standar pelayanan dari pemerintah pusat dan propinsi serta menyesuaikan dengan kondisi sumber daya dan kearifan lokal masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan fasilitas dinas secara keseluruhan, menekan dan mengurangi volume sampah di rumah tangga sehingga diharapkan dapat mengurangi volume sampah terangkut.

Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada masa Walikota Herman Abdullah dan Walikota Firdaus memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan strateginya ialah; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, mengoptimalkan sarana dan prasarana kebersihan, dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Adapun perbedaan strateginya adalah pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih menekankan pada penyuluhan atau sosialisasi tentang budaya hidup bersih kepada masyarakat dan pengoptimalan penerimaan retribusi kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan perbandingan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru berdasarkan kesamaan dan perbedaan strateginya. Berikut perbandingan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dan Walikota Firdaus:

Dalam melakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah koordinasi rutin dijalankan setiap satu kali tiga bulan, walikota juga memantau langsung ke lapangan melihat kondisi kebersihan Kota Pekanbaru, pada masa pemerintahan ini juga telah berdiri bank sampah. Sedangkan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru masa pemerintahan Walikota Firdaus masih tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang dilakukan setiap satu kali tiga bulan. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan pihak kecamatan, Pada masa pemerintahan walikota ini diresmikan bank sampah dan pemantauan langsung masa pemerintahan walikota ini juga ada melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Strategi yang kedua adalah memanfaatkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat; pada masa Walikota Herman Abdullah untuk meningkatkan dan memanfaatkan SDM yang handal dan profesional maka setiap sekali setahun diadakan pelatihan pengelolaan persampahan oleh ditjen lingkungan hidup. Walikota Herman Abdullah juga memberikan bantuan kepada petugas kebersihan yang biasanya diberikan saat bulan puasa. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus dalam pemanfaatan SDM strategi yang dilakukan sama dengan strategi yang dilakukan di

masa Walikota Herman Abdullah, bantuan sebagai bentuk variasi pemerintah kota kepada petugas kebersihan belum ada, namun pada masa pemerintahan Walikota Firdaus adanya penambahan petugas kebersihan mengingat wilayah tugas DKP bertambah menjadi 23 ruas jalan.

Strategi ke tiga adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana kebersihan; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah pengoptimalan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Sedangkan pada masa pemerintahan Walikota Firdaus pengoptimalan sarana dan prasarana ialah dengan menambah sarana dan prasarana kebersihan.

Dan strategi terakhir ialah penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dimulainya pembangunan sarana dan prasarana kebersihan, pada masa itu sampah di Kota Pekanbaru atau armada kebersihan masih bisa mengangkut sampah di Kota Pekanbaru. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus penambahan sarana dan prasarana kebersihan dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang rusak, penambahan disebabkan jumlah sampah di Kota Pekanbaru yang meningkat, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jangkauan tugas DKP menjadi 23 ruas jalan.

Adapun perbedaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yakni, pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah lebih menekankan pada penyuluhan atau sosialisasi tentang budaya hidup bersih kepada masyarakat dan pengoptimalan penerimaan retribusi kebersihan. Dan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan Walikota Firdaus lebih menekankan pada peran serta masyarakat dalam menekan dan mengurangi volume sampah lingkungan rumah tangga, dan menyesuaikan standar pelayanan kebersihan dari pemerintah pusat maupun propinsi dengan menyesuaikan kondisi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat.

Semua strategi-strategi di atas telah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru baik pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah maupun pemerintahan Walikota Firdaus. Namun relisasinya ada yang berhasil mendapatkan penghargaan kebersihan dan ada juga yang tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sampah yang bertumpuk di beberapa titik jalan. Untuk itu penulis melihat bagaimana pelaksanaan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru berdasarkan studi perbandingan masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dengan Walikota Firdaus.

## **2. Pelaksanaan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru (Studi Perbandingan Masa Pemerintahan Walikota Herman Abdullah dengan Masa Pemerintahan Walikota Firdaus)**

Dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan ada hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah baik pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dan Walikota Firdaus, disini peneliti akan membandingkan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah dan Walikota Firdaus. Adapun perbandingan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Kegiatan pelaksanaan strategi yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah sarana dan prasarana fokus pada penambahan pembuatan bak penampung sampah, komposting,



penambahan digunakan untuk pengelolaan sampah di TPA. Sedangkan pelaksanaan strategi masa Walikota Firdaus ialah penambahan sarana dan prasarana kebersihan yaitu menambah armada kebersihan, pengadaan alat berat dan peralatan untuk kebersihan.

Kegiatan pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kedua adalah peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah adanya pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan kegiatan operasionalnya adalah operasional di pengangkutan sampah, operasional di TPA, operasional di komposting, dan operasional di workshop. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus pemeliharaan sarana dan prasarana masih dikerjakan dan kegiatan operasionalnya adalah operasional di angkutan sampah, operasional di pengawasan, operasional di TPA dan operasional di Workshop.

Kegiatan pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang ketiga adalah pengembangan teknologi pengelolaan persampahan; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah masih memakai pola kumpul, angkut, dan buang (open dumping). Sedangkan masa Walikota Firdaus pengolahan kebersihan dengan metode kumpul, angkut dan olah serta menerapkan konsep 3R. Oleh karena itu sudah yang ada di rumah tangga bisa dimanfaatkan sehingga volume sampah yang terangkut berkurang, sedangkan pengolahan sampah di TPA menggunakan sistem semi sanitary landfill.

Kegiatan pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang keempat adalah sosialisasi kebijakan pengolahan sampah; masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah sosialisasi tentang kebersihan sangat gencar, banyak papan pengumuman mengenai kebersihan terpampang, di sekolah-sekolah diadakan juga penyuluhan tentang kebersihan. Penyuluhan tentang kebersihan rutin dilakukan sebagai bentuk sosialisasi. Dan himbauan di surat kabar, papan pengumuman, sosialisasi yang rutin menyebabkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat meningkat. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus sosialisasi yang dilakukan ialah dengan mengenalkan konsep yakni Reduce, Reuse, dan Recycle. Konsep ini merupakan cara untuk mengurangi jumlah sampah terangkut dan menjadikan sampah bernilai ekonomis.

Dan kegiatan Pelaksanaan Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi; monitoring dan evaluasi masa Walikota Herman Abdullah rutin dilakukan oleh walikota, monitoring dilakukan dengan rapat koordinasi atau turun langsung ke lapangan. Sedangkan monitoring yang dilakukan di masa pemerintahan Walikota Firdaus juga sama seperti yang dilakukan di masa Walikota Herman Abdullah namun pemantauan langsung oleh Walikota bersifat accidental.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pelaksanaan Strategi dalam Meraih Penghargaan Adipura**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pelaksanaan strategi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut teori Fitri Lukiastuti dan Muliawan (2011:7) dan teori George C Edwards III dalam Subarsono (2005:90) yaitu: perbedaan komunikasi antara kedua walikota, penilaian terhadap keadaan lingkungan, penilaian dan alokasi sumber daya, dan kemampuan melakukan improvisasi sesuai dengan perkembangan keadaan. Berikut penjelasan yang menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pelaksanaan strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam meraih penghargaan Adipura.

Faktor pertama ialah perbedaan komunikasi antara kedua walikota; berdasarkan wawancara, pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan penghargaan Adipura, walikota saat itu selalu mengkomunikasikan tujuannya kepada SKPD terkait dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus komunikasi yang dilakukan tidak seperti Walikota Herman Abdullah hal ini mungkin disebabkan latar belakang pendidikan yang berbeda dari masing-masing walikota. Komunikasi yang dibangun oleh Walikota Firdaus dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan SKPD terkait.

Faktor kedua yang menyebabkan perbedaan strategi ialah penilaian terhadap keadaan lingkungan; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah, Kota Pekanbaru mengalami kestabilan politik terbukti pada masa itu Walikota Herman Abdullah memimpin dari tahun 2001-2011 yang mana Kota Pekanbaru meraih penghargaan Adipura tujuh kali berturut-turut dari tahun 2005-2011. Adanya kesatuan perintah dan kesatuan komando kepada SKPD terkait. Masyarakat pada waktu itu menerima dan memahami tujuan walikota sehingga terjadilah kerjasama yang harmoni antara walikota, SKPD terkait dan masyarakat. Pada waktu itu penilaian Adipura ditentukan tempat mana yang akan dinilai. Sedangkan pada masa pemerintahan Walikota Firdaus, pada waktu penilaian pertama Adipura terjadi ketidakstabilan politik di Kota Pekanbaru akibat sengketa pemilukada sehingga SKPD di Pekanbaru tidak bekerja sebagaimana mestinya, pada saat itu Kota Pekanbaru dipimpin oleh pejabat walikota sementara, sampah banyak berserakan di setiap simpang jalan. Setelah itu Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota Firdaus pada Januari 2012 barulah kerja-kerja SKPD Kota Pekanbaru dimulai kembali. Pada penilaian pertama Adipura pada bulan November 2011 merupakan penilaian terbaru Adipura, adanya revitalisasi penilaian Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, jadi pada saat penilaian Adipura untuk tahun 2012 Kota Pekanbaru tidak memenuhi kriteria penilaian Adipura.

Faktor ketiga ialah penilaian dan alokasi sumber daya; pada masa Walikota Herman Abdullah alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan kapasitas pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2011 yakni Rp. 11.394.607.160,- dan pelayanan administrasi perkantoran Rp. 36.735.062.473,-. Sedangkan masa pemerintahan Walikota Firdaus untuk program pengembangan pengelolaan sampah dengan anggaran Rp. 17.365.000.000,- melihat anggaran yang besar dari pemerintahan Walikota Firdaus membuktikan bahwa adanya keseriusan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah di Kota Pekanbaru.

Dan faktor yang keempat adalah kemampuan melakukan improvisasi sesuai dengan perkembangan keadaan; pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah pada saat itu penilaian ditentukan tempatnya berdasarkan titik pantau dan titik wilayah, tim penilaian juga sudah ditentukan waktu turunnya sehingga tempat yang sudah ditentukan itu yang menjadi fokus kebersihan. Tetapi masa Walikota Firdaus pada bulan November 2011 penilaian Adipura dilakukan di tempat yang tidak ditentukan sebelumnya, artinya tim penilai akan menilai di tempat mana yang mereka temui, jadi pada masa Walikota Firdaus ini harus fokus menangani masalah kebersihan kota di 100% wilayah perkotaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti setelah mengumpulkan data, mengolah dan membahasnya pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam meraih penghargaan Adipura pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah ialah dari strategi yang dijalankan, ada hal-hal yang rutin dilakukan oleh Walikota Herman Abdullah yakni rutin melakukan koordinasi dan memantau langsung ke lapangan melihat kondisi kebersihan Kota Pekanbaru. Walikota saat itu juga memberikan bantuan dan hadiah kepada petugas kebersihan dan petugas kebersihan yang disiplin sebagai motivasi kepada petugas dalam membersihkan kota. Sosialisasi tentang budaya hidup bersih dan sosialisasi tentang Adipura juga selalu diadakan baik penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan keliling, posko pengaduan masyarakat, memasang papan pengumuman dan sosialisasi ke media massa sehingga hal ini menambah pengetahuan masyarakat tentang kebersihan. Tetapi, dalam hal pengelolaan sampah, masih menggunakan open dump atau pembuangan terbuka, jika penggunaan open dumping yang dilakukan secara terus-menerus maka akan berdampak pada tidak mampunya TPA menampung sampah dalam waktu yang lama karena jumlah sampah yang meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang menjadikan Kota Pekanbaru meraih Adipura ialah adalah saat itu selalu mengkomunikasikan tujuannya kepada SKPD terkait, dan masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat. Pada masa itu kondisi politik Pekanbaru stabil sehingga terjadi keselarasan antara walikota dan SKPD terkait. Dan juga penilaian Adipura pada masa pemerintahan Walikota Herman Abdullah ditentukan tempatnya berdasarkan titik pantau dan titik wilayah, maka penilai juga sudah menetapkan waktu turunnya sehingga lokasi dan waktunya sudah disiapkan untuk penilaian Adipura. Dalam hal pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru memang tidak ada yang begitu berat pada masa walikota ini tetapi sosialisasi, koordinasi dan penyuluhan yang rutin inilah yang menjadikan kesuksesan Kota Pekanbaru meraih penghargaan Adipura.
2. Dibandingkan dengan strategi masa Walikota Firdaus koordinasi masih tetap dijalankan yakni setiap sekali tiga bulan. Pada masa Walikota Firdaus petugas kebersihan dan sarana dan prasarana kebersihan ditambah mengingat semakin banyak lokasi yang menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yakni menjadi 23 ruas jalan. Namun belum adanya bantuan dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada petugas kebersihan. Pola pengolahan sampah yang diterapkan pemerintah Kota Pekanbaru adalah pola kumpul, angkut dan olah. Jadi, sampah harus diolah menjadi sumber ekonomi. Oleh karena itu, diresmikanlah bank sampah. Pemerintah Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) ke masyarakat. Sistem pengolahan sampah di TPA tidak lagi menggunakan open dumping tetapi sekarang menggunakan sistem semi sanitary landfill. Pengelolaan teknologi persampahan seperti ini merupakan keunggulan dari strategi Walikota Firdaus. Dan alokasi anggaran untuk pengembangan pengelolaan persampahan ialah Rp. 17.365.000.000. Adapun faktor-faktor yang menjadikan Kota Pekanbaru gagal meraih penghargaan Adipura ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah Pekanbaru sekarang sosialisasi tidak segenyar pada masa Walikota Herman Abdullah. Faktor selanjutnya ialah kondisi perpolitikan Pekanbaru yang tidak kondusif dan perubahan penilaian Adipura yakni perubahan pada kriteria penilaian, penilaian mencakup 100% wilayah perkotaan, maka penilai berhak menilai tempat mana saja yang ditemui, serta waktu dan orang yang akan menilai tidak diberitahu sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bryson, John. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- David, Fred. 2004. Manajemen Strategis Konsep. Jakarta: Penerbit PT Indeks.
- David, Fred. 2006. Strategic Management, Manajemen Strategis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Google.com
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 37 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan Adipura.
- Lukiastuti, Fitri & Hamdani Muliawan. 2011. Manajemen Strategik dalam Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Center for Academic Publishing Service.
- Moleong, Lexi J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Prof. Dr. Hadari. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit bagi Organisasi Non Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
- Tunggal Widjaja, Drs Amin. 2008. Manajemen Strategik (5000+ Contoh Pengantar). Jakarta. Penerbit Harvarindo.
- Usmara, A. 2006. Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses. Jakarta.